

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu tahapan hidup yang seringkali dianggap sebagai salah satu tahapan hidup paling penting karena merubah status seseorang secara sah dalam masyarakat, dari lajang menjadi istri atau suami dari pasangannya. Perkawinan adalah suatu peralihan terpenting dalam siklus kehidupan manusia (*life-cycle*) di seluruh dunia karena merupakan peralihan dari remaja ke kehidupan berkeluarga (Koentjaraningrat, 1992).

Dalam masyarakat berstruktur budaya sederhana, perkawinan akan bersifat sederhana, sempit, dan tertutup, sedangkan pada masyarakat dengan struktur budaya yang lebih maju, perkawinan akan bersifat lebih kompleks dengan pelaksanaan yang lebih terbuka dan maju (Budiana, 2018).

Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia berkaitan dengan kehidupan seksnya. Aspek penting yang perlu dikemukakan perkawinan adalah fungsi-fungsinya bagi kehidupan kebudayaan manusia. Seperti penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil dari hubungan seksual, yakni anak. Lalu perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memenuhi kebutuhan akan gengsi dan kelas masyarakat, dan sebagai pemelihara hubungan baik antar kelompok kekerabatan tertentu. Dari beberapa pernyataan sebelumnya, perkawinan menjadi penting karena sifatnya fungsionalistik. Dalam hal ini,

perkawinan adalah hal yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia bisa menempatkan diri pada fungsi dan perannya dalam suatu perkawinan. (Koentjaraningrat, 1992).

Aspek penting yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan perkawinan di Bali adalah sistem pelapisan masyarakatnya, yang awam disebut dengan *wangsa* dan *kasta*. Namun istilah *kasta* sebenarnya tidak ada dalam ajaran Hindu, karena pada dasarnya *kasta* menempatkan kedudukan manusia dalam ukuran tinggi dan rendah (Budiana, 2018). Menurut Wiana dan Raka (1993), istilah *kasta* ada karena penghayatan agama yang rendah. Bila dalam ajaran Hindu, sistem pelapisan sosial disebut dengan *warna*, namun empat *warna* atau *catur warna* kaitannya dengan profesi. Menurut Mantra (dalam Wiana dan Raka, 1993), *warna* ada pada tiap diri individu, misalnya seseorang menjadi *brahmana* bila berbakat dalam kerohanian, menjadi *ksatria* bila berbakat dalam kepemimpinan, menjadi *waisya* bila berbakat dalam bidang ekonomi, dan menjadi *sudra* bila ahli menggunakan tenaga fisik.

Menurut Budiana (2018), struktur sosial yang lebih dikenal di Bali adalah empat *wangsa* atau *catur wangsa* yang menggolongkan masyarakat menjadi *brahmana*, *ksatria*, *waisya*, dan *sudra*. Tiga *wangsa* pertama digolongkan menjadi *tri wangsa* dan *sudra* menjadi *jaba wangsa*. Penggolongan *wangsa* ini didasari garis keturunan, bukan fungsi khusus. Dari konsep *warna* dan *wangsa*, dinyatakan bahwa di Bali tidak dikenal konsep *kasta*. Membandingkan *kasta* di India dengan *wangsa* di Bali, berjalannya sistem *wangsa* di Bali menunjukkan fleksibilitas interaksi antar *wangsa*, seperti makan bersama juga menggarap upacara bersama sebagai hal lumrah. Hal ini tidak terjadi dalam penggolongan masyarakat dengan *kasta* seperti

di India. Dari penjelasan ini, penulis memilih menggunakan istilah *wangsa* dalam penelitian ini dibandingkan dengan istilah *kasta*.

Kebudayaan Bali telah mengatur bentuk perkawinan dan tata cara perkawinan. Dalam konteks sosial budaya Bali, dikenal dua model perkawinan, yakni endogami dan eksogami. Perkawinan endogami adalah aturan yang mengharuskan seseorang kawin dengan seseorang dari kelompok yang sama, sedangkan perkawinan eksogami memperbolehkan seseorang kawin dengan orang dari luar kelompoknya (Clayton, 1975). Pada masyarakat Hindu-Bali, perkawinan endogami *wangsa* adalah preferensi umum yang dianggap ideal (Budiana, 2012; Kebayantini, 2016).

Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana cenderung mengistimewakan laki-laki dibandingkan perempuan. Laki-laki diberi kedudukan dan peran istimewa seperti hak pengambilan keputusan penting sedangkan perempuan hanya menerima keputusan dan hanya anak-laki-laki yang berhak atas warisan, sedangkan perempuan hanya sebagai penikmat (Rahmawati, 2016). Sistem patrilineal dalam masyarakat Hindu-Bali berkaitan dengan sistem *wangsa* karena *wangsa* adalah penggolongan yang didasari oleh garis keturunan patrilineal.

Sehubungan dengan sistem patrilineal, konsekuensi adalah perempuan yang sudah menjadi istri adalah mengikuti suaminya. Dalam budaya Hindu-Bali, bila perkawinan terjadi antara perempuan dan laki-laki yang *wangsa*-nya sama (endogami *wangsa*), hal itu disebut sebagai perkawinan biasa. Jika perempuan dari *wangsa* yang lebih rendah kawin dengan laki-laki dari *wangsa* yang lebih tinggi, maka ia akan naik *wangsa* dengan mendapat gelar *Jero*. Sebaliknya, bila perempuan

dari *wangsa* yang lebih tinggi kawin dengan laki-laki dari *wangsa* yang lebih rendah, maka ia akan turun *wangsa* atau biasa disebut *nyerod*.

Nyerod adalah Bahasa Bali dari “terpeleset”. Menurut Segara (2015), ada dua jenis perkawinan *nyerod*. Pertama, perkawinan laki-laki *ksatria*, *waisya*, dengan perempuan *brahmana*, disebut *alangkahi karang hulu*. Kedua, perkawinan laki-laki *sudra* dengan perempuan *brahmana*, disebut *asu pundung*. Manakala terjadi perkawinan perempuan dengan laki-laki dari *wangsa* lebih rendah (*nyerod*), perempuan tersebut dianggap keluar dari *wangsa*-nya (Budiana, 2012).

Untuk perkawinan beda atau pindah agama, dalam kitab suci *Weda* tidak ada penjelasan bagaimana pindah agama dalam Hindu. Perkawinan beda agama tidak sama dengan perkawinan beda *wangsa*, lebih khususnya *nyerod*. Mahardini dan Tobing (2017) berpendapat bahwa sebagian besar masyarakat Bali lebih menyukai dan lebih bisa menerima laki-laki keturunan luar Bali sebagai menantu ketimbang anak perempuannya harus *nyerod*. Sejalan dengan itu, dalam wawancara dengan seorang Ahli Hukum Adat dan Budaya Bali, Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si., mengatakan bahwa ada perilaku khas keluarga *tri wangsa* di Bali yang lebih bisa menerima perkawinan beda agama daripada *nyerod*.

“Kalau *nyerod* itu kan pindah status, misal *tri wangsa* jadi *jaba*. Dalam artian kekerabatan, perempuan ikut laki-laki. Prosesnya dulu ada sebutan *mepatiwangi*, menghilangkan status atau *wangsa* perempuan. Kalau secara administratif, nama gak berubah. Kalau beda agama, memang perempuan ikut pihak laki-laki, tapi tidak ada turun *wangsa*. Karena itu juga ada perilaku masyarakat *tri wangsa* di Bali yang lebih memilih putrinya kawin keluar, misal beda agama, atau dengan orang asing, daripada *nyerod*. Lebih merasa terhina jika *nyerod* dibanding putrinya sama orang non Hindu. Sehingga perlakuan keluarga bisa lebih menerima yang memang diambil non Hindu, ketimbang *nyerod*” (Wawancara 16 Juni 2020)

Sudut pandang masyarakat Hindu-Bali terhadap sistem *wangsa* mempengaruhi posisi perkawinan. Hal ini berdampak pada bagaimana masyarakat Hindu-Bali memandang perkawinan terutama perkawinan beda *wangsa*, sehingga *wangsa* kerap menjadi pro dan kontra dalam perkawinan, sekaligus menjadi sumber konflik.

Bila pada zaman kerajaan dulu, perkawinan beda *wangsa* adalah sesuatu yang dilarang, Saat itu ada aturan yang didalamnya berisi sanksi ditenggelamkan sampai mati (*lebok*) dan sanksi dibuang ke pulau luar Bali (*selong*) bagi pelaku perkawinan beda *wangsa*. Namun saat ini, Pemerintah Provinsi Bali tidak melarang perkawinan beda *wangsa* melalui keputusan DPRD Provinsi Bali No. 11/Tahun 1951 yang berisikan pencabutan sanksi-sanksi bagi pelaku perkawinan beda *wangsa*. Hal ini karena sanksi-sanksi tersebut tidak sesuai perkembangan masyarakat merdeka berdasarkan Pancasila. Keputusan DPRD Bali No.11/Tahun 1951 ini juga disebut peraturan perhubungan perkawinan antar *catur wangsa*.

Berbeda dengan aturan resmi yang dikeluarkan pemerintah, beberapa pandangan masyarakat masih tidak menyetujui perkawinan beda *wangsa*. Salah satunya dikutip dari hasil wawancara Dewi (2015) kepada pemuka agama Hindu, Ida Pedanda Gede Putra Giri Ngenjung memberi pandangan tentang perkawinan beda *wangsa* dari sudut pandang agama sebagai berikut:

“Itu (perkawinan beda *wangsa*) sebenarnya tidak boleh terjadi. Karena *asu mundung karang* sama *hulu*. Nah sekarang itu dihilangkan, maka orang itu tidak tahu dengan sesana etika. Etikanya sekarang, kalau seandainya itu dibiasakan begitu, etika dan norma kita di Bali akan hilang” (Dewi, 2015: III-4).

Sistem stratifikasi sosial yang dianut suatu masyarakat, seperti sistem *wangsa* yang dianut masyarakat Hindu-Bali merambah pada banyak aspek kehidupan sosial juga pada pandangan akan apa yang dianggap ideal sesuai sistem itu. Seperti halnya perkawinan yang secara umum idealnya dilandasi rasa cocok antar calon mempelai, dipandang lebih ideal dalam masyarakat Hindu-Bali bila calon mempelai berasal dari *wangsa* yang sama. Sehingga hingga saat ini, masih ada yang tidak setuju pada perkawinan beda *wangsa* karena dipandang kurang ideal. Pandangan-pandangan itu bisa merambah lagi pada kebahagiaan mempelai baik sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan beda *wangsa*.

Pada dasarnya, perkawinan bagi pasangan suami istri bertujuan tercapainya kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan dalam perkawinan bukan hal mudah. Terkadang harapan antar-individu tidak sesuai. Hal ini dapat berakibat timbulnya pertentangan, perselisihan dan bahkan berakhir dengan perceraian (Dewi & Basti, 2008). Perkawinan merupakan pembentukan keluarga baru dengan menyatukan dua individu berlatar belakang berbeda. Menyatukan dua individu ini bukan hal mudah dan sering mengakibatkan konflik (Santrock, 2002). Dalam rumah tangga, perempuan lebih beresiko mengalami konflik, karena ketika menjadi istri, perempuan secara total menyerahkan dirinya pada suami (Dewi & Basti, 2008).

Hunt & Metcalf (1996) dan Horney (1945) mengemukakan dua konflik, yaitu konflik dengan individu lain dan konflik dalam diri yang juga biasa disebut dengan konflik interpersonal dan intrapersonal. Konflik interpersonal terjadi ketika kebutuhan atau ide individu dianggap berbeda atau bertentangan dengan kebutuhan atau ide individu lain (Verdeber, 2007). Menurut Fisher, dkk. (2000), konflik

interpersonal timbul karena perbedaan tujuan atau perilaku yang tidak sesuai. Menurut Horney (1945), suatu ketika harapan, minat, atau pendirian kita bertabrakan dengan orang lain disekitar kita. Konflik interpersonal perkawinan adalah keadaan pasangan yang menghadapi masalah dalam perkawinannya karena perbedaan kebutuhan, keinginan dan latar belakang dan nampak dalam perilaku kurang harmonis ketika menghadapi konflik (Dewi & Basti, 2008).

Selain konflik interpersonal, individu bisa mengalami konflik intrapersonal. Konflik dalam diri atau intrapersonal ini adalah bagian dari kehidupan ketika individu dihadapkan pada dua pilihan atau keinginan yang arahnya berbeda, atau antara harapan dan kewajiban atau antara dua perangkat nilai (Horney, 1945). Horney menyatakan bahwa konflik intrapersonal bersumber dari pengalaman hubungan antar pribadi (Alwisol, 2011). Konflik intrapersonal menurut Hunt dan Metcalf (1996) adalah konflik yang terjadi dalam diri individu, misalnya ketika keyakinan individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat, atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya.

Dalam membina kehidupan rumah tangga yang merupakan bagian dari hubungan interpersonal, setiap pasangan tidak terlepas dari konflik. Dewi dan Basti (2008) menyimpulkan bahwa konflik interpersonal dalam perkawinan adalah keadaan suami istri yang sedang menghadapi masalah dalam perkawinannya karena adanya perbedaan kebutuhan, keinginan, dan latar belakang, yang kemudian terlihat dari perilaku kurang harmonis ketika menghadapi konflik. Dari pengalaman konflik dengan pasangan itu, individu bisa mengalami konflik dalam dirinya.

Penelitian yang dilakukan Gurin, dkk (dalam Dewi & Basti, 2008) menyimpulkan bahwa konflik senantiasa terjadi dalam kehidupan perkawinan di mana hasil penelitiannya menunjukkan 45% orang yang sudah kawin mengatakan bahwa dalam kehidupan bersama akan selalu muncul berbagai masalah dan 32% pasangan menilai bahwa perkawinan bahagia juga mengalami pertentangan.

Pada konteks perkawinan beda *wangsa*, penelitian Amritashanti dan Suprpti (2017) menunjukkan bahwa konflik telah dialami sejak masa pacaran, dan walaupun menemui berbagai macam konflik setelah memilih untuk kawin *nyerod*, mereka tidak menyesali pilihan yang telah mereka buat karena konflik bisa teratasi.

Hasil wawancara dengan I Gst Ayu S. (51 Tahun), yang telah menjalani perkawinan *nyerod* selama 29 tahun menjelaskan bahwa sejak awal perkawinan terjalin hubungan harmonis.

“Kami berdua di rumah ini, nikah sekian lama, jarang konflik, jarang bertengkar, begitu juga keluarga. Kalau ada masalah, *astungkara* selesaiin sama-sama dengan kepala dingin, sambil ngopi atau ngeteh ngomong. Kalau diluar sana banyak yang keluarga besarnya justru memperlmasalahkan, khususnya karena *nyerod* jadi ada konflik ini itu, di keluarga saya gak ada seperti itu, keluarga besar suami juga gak ada yang, kasarnya bilangnyanya ngajak ribut juga gak ada. Makanya kami bisa sejauh ini harmonis di rumah” (IG170919:24).

Berbeda dengan wawancara diatas, penelitian Lestari (2014) justru menyimpulkan bahwa ada perempuan yang belum sepenuhnya diterima keluarga besarnya sendiri karena memilih kawin *nyerod*. Senada dengan itu, Mahardini dan Tobing (2016) berpendapat bahwa *nyerod* kerap dianggap merusak nama baik keluarga besar. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perempuan *nyerod* mengalami hal menyakitkan ketika harus menjaga sikap dengan keluarga asal, sebab *wangsa*-nya sudah tidak sejajar dengan keluarga (Alandari & Muti'ah, 2019).

Amritashanti (2017), salah satu subjek yang menjalani perkawinan *nyerod* tetap diterima di rumah keluarga besarnya atau *griya* namun ada perubahan panggilan dan cara memanggil anggota keluarga lain karena *wangsa* mereka lebih tinggi. Perubahan penerimaan dan perlakuan keluarga besar perempuan ini merupakan salah satu konsekuensi *nyerod*.

Dalam realitanya, ada perempuan *nyerod* yang tidak berhasil melewati konflik dengan mulus. Sebagai contoh, hasil wawancara *preliminary* dengan Ida Ayu S. (62) yang menjalani perkawinan *nyerod* selama 38 tahun menunjukkan hingga sekarang masih terjadi konflik dengan pasangan.

“Sejak awal perkawinan *nyerod* sudah mulai konflik dari keluarga besar dan ditentang dengan sangat keras. Dalam perjalanan perkawinan pun konflik internal juga terjadi, bahkan sampai sempat pisah rumah nih saya. Sampai sekarang ini, udah jadi nenek-nenek masih konflik, bahkan untuk hal sepele. Kadang saya sebagai perempuan merasa terpukul, merasa direndahkan, sekarang ini akhirnya lagi pisah rumah” (IS060919:12).

Wawancara *preliminary* menunjukkan bahwa kedua subjek mengalami konflik, ada yang minim konflik, ada pula yang masih mengalami konflik setelah bertahun-tahun perkawinannya sehingga studi menunjukkan penggambaran konflik perkawinan *nyerod* yang berbeda dari kedua subjek.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, sistem *wangsa* sebagai sistem stratifikasi sosial masyarakat Hindu-Bali menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial termasuk perkawinan hingga saat ini. Meski ada UUD yang mengatur perkawinan bagi warga negara, aturan adat Bali tetap ada, seperti eksistensi aturan *nyerod*. Ideologi patriarkal Bali juga menunjukkan subordinasi perempuan masih terjadi, sehingga perempuan rentan mengalami konflik dari konsekuensinya setelah

nyerod, meski konflik sendiri adalah hal normal. Konflik yang dialami perempuan Hindu-Bali dalam perkawinan *nyerod* berbeda dengan konflik pada perkawinan beda agama. Sehingga, perkawinan *nyerod* dan konsekuensi-konsekuensinya masih menjadi isu yang layak untuk diteliti. Konflik-konflik yang dialami oleh perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan *nyerod* menjadi menarik untuk diungkap, karena tidak hanya berkaitan dengan konflik perkawinan (*marital conflict*) melainkan juga dengan konflik kelas sosial. Karena itu penulis tertarik untuk meneliti konflik yang dialami perempuan yang menjalani perkawinan *nyerod*, baik pada bentuk-bentuk konfliknya secara interpersonal dan intrapersonal, maupun penyebab dan dampak konfliknya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka dirumuskan *grand-tour question*, yaitu; “Bagaimana gambaran konflik interpersonal dan intrapersonal perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan turun *wangsa (nyerod)*?”.

Untuk memperdalam pertanyaan penelitian tersebut, dibuat *sub-question* yaitu:

1. Bagaimana bentuk konflik interpersonal dan intrapersonal pada perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan turun *wangsa (nyerod)*?
2. Apa sajakah penyebab konflik interpersonal dan intrapersonal pada perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan turun *wangsa (nyerod)*?
3. Bagaimana konflik interpersonal dan intrapersonal berdampak pada perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan turun *wangsa (nyerod)*?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Penelitian tentang perkawinan beda *wangsa* dan turun *wangsa* (*nyerod*) dalam budaya Hindu-Bali sudah beberapa kali dilakukan dan dikaji dengan pendekatan kualitatif. Pada berbagai penelitian tersebut penulis menemukan lebih banyak yang memfokuskan pada perempuan.

Salah satu dari penelitian tersebut adalah penelitian Lestari (2014) yang menggambarkan penghayatan psikologi perempuan *nyerod* dalam melakukan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial dibagi menjadi empat area, yakni status *wangsa* dalam diri, area keluarga asal, area keluarga pasangan dan area masyarakat. Penyesuaian status *wangsa* dalam diri yang dimaksud adalah penyesuaian pada perubahan status karena sudah turun *wangsa*. Dalam penelitian ini ditulis bahwa penyesuaian sosial dilakukan agar tidak terjadi konflik dalam lingkungan dan dalam diri. Padahal konflik adalah hal tak wajar dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menunjukkan subjek dapat melakukan penyesuaian sosial di lingkungan keluarga pasangan dan tidak mampu dalam keluarga asalnya karena banyaknya penolakan anggota keluarga. Penolakan-penolakan ini tidak disebut sebagai konflik, padahal jika memang ada pertentangan, hal itu dapat diartikan sebagai konflik interpersonal. Fokus penelitian ini adalah area-area penyesuaian diri, sehingga bagaimana konflik dengan keluarga terjadi tidak dijelaskan secara komprehensif.

Pada penelitian Mahardini dan Tobing (2017), diperlihatkan lima aspek penyesuaian perempuan *nyerod* yakni, penyesuaian diri pribadi dalam konteks hubungan dengan pasangan, penyesuaian dengan keluarga asal yang dilakukan dengan berusaha menjalin hubungan baik, penyesuaian dengan keluarga pasangan

dilakukan dengan berusaha menerima dan bersikap baik, dan penyesuaian sosial dalam masyarakat dilakukan dengan melakukan rasionalisasi. Ketiga subjek mengalami penolakan dari keluarga asal karena perkawinan *nyerod* masih menjadi hal yang sangat dihindari keluarga. Selain itu juga subjek sempat mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Penolakan dan diskriminasi ini tidak dijelaskan secara rinci dalam jurnal karena penelitian memang berfokus pada penyesuaian diri.

Sedangkan penelitian Amritashanti dan Suprapti (2017) membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri subjek, seperti faktor perkembangan, psikologis, adat budaya, dan lingkungan. Motivasi yang mendorong subjek untuk menyesuaikan diri dalam perkawinan *nyerod* adalah rasa cocok dengan pasangan. Ada subjek yang sudah mengalami konflik dengan keluarganya bahkan sebelum perkawinan, yang kemudian berlanjut hingga setelah berlangsungnya upacara perkawinan, yakni kesulitan ketika ingin melangsungkan upacara pamitan atau *mepamit*. Upacara *mepamit* baru bisa dilangsungkan setelah mendapatkan izin keluarga perempuan. Menyadari konsekuensi *nyerod* dan potensi konflik yang bisa muncul, kedua subjek menyesuaikan diri dengan menggunakan Bahasa Bali halus ketika berkomunikasi dengan keluarga asal mereka sebagai bentuk hormat kepada *wangsa* yang lebih tinggi, dimana hal ini tidak dilakukan sebelum mereka kawin.

Jika melihat beberapa penelitian *nyerod* sebelumnya (Lestari, 2014; Mahardini & Tobing, 2017; Amritashanti & Suprapti, 2017), konflik sebenarnya erat kaitannya dengan penyesuaian diri. Menurut Pickering (2006), ketika individu dapat mengatasi konflik dengan baik, individu akan merasakan manfaat konflik seperti

meningkatnya kemampuan identifikasi dan pemecahan masalah, penyesuaian diri dengan kenyataan, serta hubungan yang lebih berkembang.

Selain penyesuaian diri, ada penelitian *psychological well-being* yang membahas penerimaan diri, kemampuan membangun hubungan positif, dan harapan perempuan Hindu yang turun *wangsa* karena perkawinan (Arisandi, 2015). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa keputusan kawin *nyerod* keempat subjek menimbulkan konflik dengan keluarga asal dan membuat mereka sempat mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Namun, bagaimana konflik terjadi tidak dijelaskan secara rinci.

Penelitian tentang penyelesaian konflik pasangan beda *wangsa* di Bali dilakukan Dewi (2015) dengan menggunakan teori konflik hubungan interpersonal milik DeVito dan Wood. Dalam kesimpulannya, *wangsa* adalah aspek yang berpengaruh mengarahkan subjek memilih strategi penyelesaian konflik. Isu-isu konflik dalam penelitian ini ada empat, ada isu yang dipicu pihak eksternal, isu terkait anak, isu karakter pasangan, dan isu finansial. Penelitian ini tidak khusus mengkaji perkawinan *nyerod* dan fokus pada penyelesaian konflik perkawinan.

Penelitian *wangsa* memang masih menarik untuk diteliti karena merupakan keunikan budaya Hindu di Bali. Begitu juga konsekuensi-konsekuensinya masih terjadi hingga saat ini. Sistem stratifikasi sosial *wangsa* yang termasuk bagian budaya patrilineal membuat para peneliti lebih banyak mengkaji dari sisi perempuan. Belum adanya penelitian yang secara spesifik meneliti fokus yang sama dengan penelitian ini, di mana tak hanya konflik interpersonal yang dikaji,

melainkan juga konflik intrapersonal. Sehingga, penulis kali ini berfokus pada konflik interpersonal dan intrapersonal perempuan yang menjalani perkawinan turun *wangsa* (*nyerod*) dan dampak dari konflik-konflik yang terjadi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konflik interpersonal dan intrapersonal perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan turun *wangsa* (*nyerod*) meliputi bentuk konflik secara interpersonal dan intrapersonal, penyebab konflik, dan dampak yang dirasakan dari konflik ketika menjalani perkawinan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu psikologi yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya Hindu di Bali yang masih banyak dipertahankan hingga saat ini, khususnya tentang konflik perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan turun *wangsa* (*nyerod*). Penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik serupa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian diharapkan membuka mata penulis sebagai perempuan Hindu-Bali dalam melihat konflik perempuan Hindu-Bali lainnya. Bagi perempuan Hindu-Bali yang menjalani perkawinan turun *wangsa* (*nyerod*), penelitian ini bisa menjadi referensi ketika menghadapi konflik, dan bagi praktisi Psikologi, penelitian

ini bisa memberi pemahaman permasalahan psikologis yang berkaitan dengan nilai budaya Hindu-Bali sehingga bisa menjadi acuan ketika ada masalah yang relevan.